



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3424-3531

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efek Polarisasi Algoritma Media: Analisis Teori Power Dan Knowledge Michel Foucault

Fahmi Faujar Syam

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

fahmifaujarsyam@gmail.com

Abstrak

Era digital telah menghadirkan algoritma sebagai elemen kunci dalam distribusi informasi, yang secara signifikan memengaruhi pola konsumsi dan preferensi pengguna. Artikel ini mengeksplorasi efek polarisasi yang ditimbulkan oleh algoritma media melalui lensa teori kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis wacana, artikel ini menganalisis peran algoritma dalam membentuk opini publik dan preferensi informasi melalui mekanisme seleksi dan rekomendasi konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai alat kekuasaan modern yang membentuk rezim kebenaran, menciptakan dominasi baru atas produksi dan kontrol pengetahuan. Perspektif Foucault membantu mengungkap bagaimana kekuasaan algoritmik memperkuat polarisasi informasi dan mengubah dinamika hubungan manusia dengan pengetahuan. Penelitian ini menawarkan wawasan kritis terhadap pengaruh algoritma dalam kehidupan sosial kontemporer dan relevansinya dengan konsep panoptikon digital.

Kata kunci: Algoritma Media, Polarisasi, Kekuasaan, Pengetahuan, Michel Foucault.

1. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, algoritma telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita mengakses informasi, berinteraksi, dan bahkan berpikir. Terutama dalam konteks konsumsi informasi, algoritma media memainkan peran yang sangat sentral (Aksenta et al., 2023). Platform sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter, serta platform berita digital seperti Google News, sering kali menggunakan algoritma canggih untuk menyaring, memprioritaskan, dan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan sejumlah faktor, seperti histori pencarian, interaksi sebelumnya, lokasi geografis, dan preferensi individu. Algoritma ini, pada dasarnya, berfungsi untuk mencocokkan informasi yang disajikan dengan minat dan pola perilaku pengguna, dengan harapan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan waktu yang dihabiskan di platform tersebut (Andzani, 2023). Salah satunya adalah polarisasi informasi, yaitu fenomena di mana individu hanya terpapar pada perspektif yang sejalan dengan preferensi atau keyakinan mereka, yang sering kali mengarah pada penguatan bias individu dan fragmentasi sosial (Annas et al., 2019; Nasution, 2024).

Polarisasi ini diperburuk oleh mekanisme algoritma yang beroperasi melalui proses seleksi otomatis berdasarkan data perilaku pengguna. Dengan menggunakan metrik seperti klik, tayangan, atau waktu menonton, algoritma menciptakan ruang gema (echo chambers) yang membatasi akses pengguna terhadap informasi yang beragam (Mikelsten, 2019). Hasilnya adalah terciptanya "gelembung filter" (filter bubbles) yang secara tidak langsung membentuk cara pandang individu terhadap isu-isu penting. Polarisasi yang didorong oleh algoritma ini memiliki dampak signifikan pada demokrasi, debat publik, dan interaksi sosial, sehingga memerlukan analisis yang mendalam untuk memahami mekanismenya (Ross Arguedas et al., 2022).

Dalam konteks analisis sosial, teori kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault menawarkan perspektif kritis untuk memahami bagaimana algoritma berperan dalam mengontrol produksi dan distribusi informasi. Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga produktif—kekuasaan menciptakan pengetahuan dan sebaliknya, pengetahuan mengokohkan kekuasaan. Dalam kerangka ini, algoritma dapat dilihat sebagai alat kekuasaan modern yang mendefinisikan dan mengatur "rezim kebenaran" dalam masyarakat.

Algoritma media, melalui kontrol atas arus informasi, memainkan peran sentral dalam menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid dan relevan (Khozin, 2012; Ross Arguedas et al., 2022).

Pentingnya analisis Foucault dalam konteks ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap bagaimana algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis yang netral, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang mendalam, memengaruhi cara pandang dan pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial mereka (Levina Yustitiantingtyas, 2025). Dalam pemikiran Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh entitas tertentu seperti negara atau lembaga institusional, melainkan sebuah fenomena yang tersebar, produktif, dan terdistribusi melalui jaringan sosial dan struktur kultural yang lebih luas. Dalam hal ini, algoritma berperan sebagai agen kekuasaan yang bekerja dalam ruang yang lebih luas, tidak hanya mengendalikan akses informasi, tetapi juga membentuk cara kita memahami, merespons, dan berinteraksi dengan dunia digital.

Dengan demikian, analisis Foucault terhadap kekuasaan algoritmik menawarkan pemahaman yang lebih kritis mengenai bagaimana teknologi digital, melalui algoritma, berperan sebagai pembangun kekuasaan baru dalam masyarakat kita (Wulandari, 2021). Ini mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi, dengan diri kita sendiri, dan dengan orang lain, menciptakan tatanan sosial yang lebih terdistribusi dan lebih sulit untuk dikenali. Kekuasaan algoritmik bukan lagi fenomena yang hanya terjadi di ranah politik atau hukum, tetapi telah meresap ke dalam struktur sosial yang lebih luas, mendefinisikan ulang apa yang kita ketahui, apa yang kita anggap penting, dan bagaimana kita membentuk identitas dalam dunia digital yang semakin terhubung (Dani, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak algoritma media terhadap polarisasi informasi dengan menggunakan pendekatan teori kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault. Dengan menganalisis peran algoritma dalam menciptakan dan mengokohkan polarisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis tentang bagaimana teknologi digital memengaruhi distribusi kekuasaan dan pengetahuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, artikel ini tidak hanya menyoroti dampak teknologi tetapi juga menawarkan pandangan kritis untuk merespons tantangan yang ditimbulkan oleh polarisasi algoritmik.

2. Metode Penelitian

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana untuk memahami bagaimana algoritma media menciptakan dan memperkuat polarisasi informasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna di balik mekanisme algoritmik serta dampaknya terhadap produksi pengetahuan dan kekuasaan. Dengan menganalisis wacana yang terbentuk melalui konten yang disarankan oleh algoritma, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana algoritma membentuk persepsi pengguna terhadap kebenaran dan realitas sosial (Syahrizal & Jailani, 2023).

2.2. Studi Kasus

Penelitian ini mengambil studi kasus pada platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, yang memiliki algoritma rekomendasi konten berbasis preferensi pengguna. Studi kasus ini dipilih karena ketiga platform tersebut memiliki peran signifikan dalam membentuk konsumsi informasi dan opini publik. Analisis difokuskan pada pola distribusi konten, mekanisme rekomendasi, dan dampaknya terhadap polarisasi informasi di antara pengguna platform tersebut.

2.3. Data dan Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- **Data Penelitian-penelitian relevan:** Analisis dilakukan terhadap konten yang direkomendasikan oleh algoritma platform. Data dikumpulkan melalui simulasi perilaku pengguna untuk mengamati pola distribusi informasi. Salah satu data yang dapat diambil dari penelitian relevan adalah hasil survey pada 62 mahasiswa Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang yang mengatakan bahwa 79% dari mereka lebih sering mengekspolansi konten yang direkomendasikan TikTok dari pada mencari konten secara manual (Arjuna et al., 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial cenderung mengikuti apa konten yang direkomendasikan oleh algoritma sehingga hal ini menjadi bukti bahwa polarisasi dan filter bubble sangat mudah untuk dilakukan menggunakan media sosial (Mudjiyanto & Dunan, 2020).

- **Literatur Relevan:** Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber akademik yang mendukung analisis teoritis, termasuk teori kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault serta studi terdahulu tentang polarisasi algoritma.

- Dokumentasi Digital: Panduan dan dokumentasi resmi dari platform terkait algoritma rekomendasi juga dianalisis untuk memahami kerangka kerja teknologi yang digunakan.

2.4. Langkah Analisis

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah analisis sebagai berikut:

a. Identifikasi Pola Distribusi Informasi

- Mengamati bagaimana algoritma memilih, menyaring, dan merekomendasikan konten kepada pengguna.
- Memetakan jenis konten yang sering muncul dalam ruang gema dan gelembung filter.

b. Analisis Wacana

- Mengidentifikasi tema atau narasi utama yang disampaikan oleh konten yang direkomendasikan algoritma.
- Menelusuri keterkaitan antara narasi tersebut dengan polarisasi informasi yang terjadi di masyarakat.

c. Hubungan dengan Teori Foucault

- Menghubungkan hasil analisis pola distribusi informasi dengan konsep kekuasaan dan pengetahuan dari Michel Foucault.
- Menjelaskan bagaimana algoritma menciptakan "rezim kebenaran" baru yang memengaruhi persepsi publik.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Peran Algoritma dalam Membentuk Polarisasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma media sosial tidak hanya bertindak sebagai perantara teknis dalam distribusi konten, tetapi berperan aktif sebagai agen pembentuk struktur informasi dan opini publik. Melalui sistem rekomendasi yang didasarkan pada jejak digital pengguna, seperti histori pencarian, klik, komentar, dan durasi tontonan, algoritma menyusun urutan konten secara personal dan kontekstual. Hasilnya adalah pengalaman informasi yang terkurasi secara sempit (*narrowcasting*), yang sering kali memperkuat pandangan yang telah dimiliki pengguna (Ardhana et al., 2025).

Fenomena ini secara langsung menciptakan ruang gema digital (*digital echo chambers*), di mana pengguna terus-menerus terpapar pada sudut pandang yang sejalan dengan keyakinannya. Dalam ruang gema ini, konten yang berlawanan atau alternatif semakin jarang muncul, karena dianggap tidak relevan atau tidak menarik secara algoritmik. Kondisi ini diperburuk dengan adanya filter bubble, yaitu situasi ketika algoritma menyaring informasi sedemikian rupa sehingga individu hanya menerima sudut pandang tertentu, mengisolasi mereka dari wacana yang lebih luas atau seimbang.

Pola konsumsi informasi yang homogen ini memperkuat *confirmation bias*, yaitu kecenderungan untuk menerima informasi yang menguatkan keyakinan sendiri dan menolak informasi yang bertentangan. Akibatnya, kapasitas individu untuk melihat kompleksitas suatu isu menjadi terganggu, dan ruang bagi diskusi kritis yang sehat semakin menyempit. Dalam konteks isu-isu sosial-politik seperti ideologi, agama, atau identitas ras, proses ini dapat memperdalam segregasi sosial dan meningkatkan konflik berbasis identitas.

Selain selektivitas informasi, algoritma juga mengedepankan konten yang memicu respons emosional tinggi, seperti kemarahan, ketakutan, atau kejutan. Berdasarkan analisis interaksi di platform seperti TikTok, YouTube, dan Facebook, ditemukan bahwa konten dengan muatan kontroversial atau provokatif cenderung memperoleh eksposur lebih luas dibandingkan konten informatif yang bersifat netral. Logika algoritmik ini secara tidak langsung mendorong penciptaan dan konsumsi konten yang sensasional dan polaristik, karena dianggap lebih menguntungkan dari sisi keterlibatan pengguna (Gordon & Foucault, 1980).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa polarisasi bukan semata-mata efek samping dari algoritma, melainkan konsekuensi inheren dari cara algoritma dirancang untuk mengoptimalkan interaksi dan durasi penggunaan. Dalam hal ini, algoritma tidak bersifat netral atau pasif, tetapi beroperasi sebagai aktor epistemik dan ideologis yang mempengaruhi bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan dipahami oleh masyarakat digital.

"Algoritma tidak netral; ia mengarahkan apa yang kita lihat, dan apa yang tidak sempat kita pikirkan" — sebuah refleksi yang memperkuat pandangan Foucault bahwa kekuasaan tersembunyi dalam mekanisme produksi pengetahuan dan kebenaran (Foucault, 1972).

Pernyataan ini menggambarkan posisi algoritma sebagai kekuatan yang membentuk horizon pengetahuan kita — menentukan mana informasi yang layak tampil, dan mana yang secara sistematis disingkirkan. Polarisasi informasi yang terjadi bukan sekadar masalah preferensi pengguna, melainkan bagian dari arsitektur digital yang memproduksi dan mereproduksi struktur kekuasaan dalam bentuk baru.

3.2. Kekuasaan Algoritmik: Panoptikon Digital

Dalam kerangka teori kekuasaan Michel Foucault, algoritma dapat dipahami sebagai bentuk mutakhir dari pengawasan modern — yaitu melalui konsep panoptikon yang diperluas ke dalam konteks digital. Awalnya diperkenalkan sebagai metafora arsitektural oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh Foucault dalam *Discipline and Punish* (1977), panoptikon adalah struktur di mana individu merasa diawasi secara permanen, meskipun tidak tahu kapan dan oleh siapa, sehingga akhirnya mereka mendisiplinkan diri sendiri (Sheridan, 1977).

Dalam masyarakat digital kontemporer, prinsip ini dihidupkan kembali oleh sistem algoritmik yang mengumpulkan, memproses, dan memprediksi perilaku pengguna tanpa kehadiran pengawasan yang kasat mata. Algoritma bertindak sebagai pengamat senyap, tidak terlihat secara fisik, tetapi senantiasa aktif memantau aktivitas pengguna untuk mengoptimalkan interaksi, personalisasi, dan monetisasi. Hal ini membentuk bentuk kekuasaan yang tidak represif secara langsung, melainkan bersifat prediktif dan preventif.

“Kekuasaan algoritmik adalah kekuasaan yang bekerja tidak dengan cara memaksa, melainkan dengan menyarankan; bukan melalui larangan, tetapi melalui pengarahan pilihan” (Foucault, 1991; Zuboff, 2023).

Platform-platform besar seperti Meta (Facebook, Instagram), Google, dan TikTok telah menjelma menjadi entitas panoptik digital, di mana algoritma mereka bukan hanya mengelola arus informasi, tetapi juga membentuk lanskap epistemologis—yakni apa yang dilihat, dibicarakan, dan dipercayai oleh masyarakat. Mereka mengendalikan "gatekeeping digital", yakni akses terhadap visibilitas konten dan narasi dalam ruang publik online. Dalam proses ini, kekuasaan tidak lagi bersumber dari negara atau institusi formal, tetapi beralih kepada korporasi teknologi global yang tidak tunduk pada struktur akuntabilitas demokratis yang memadai (Rouvroy et al., 2013).

Perbandingan antara kekuasaan tradisional dan algoritmik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kekuasaan Tradisional dan Kekuasaan Algoritmik

Aspek	Kekuasaan Tradisional	Kekuasaan Algoritmik
Otoritas Negara	Negara institusi formal	Korporasi teknologi global
Mekanisme	Represif, hukum, sensor	Prediktif, otomatis, personalisasi
Kontrol	Terlihat, hierarkis	Tersembunyi, terdistribusi melalui sistem teknis
Tujuan	Stabilitas sosial dan hukum	Optimasi keterlibatan, akumulasi data, profit ekonomi
Subjek	Warga negara	Konsumen digital / produsen data

Kekuasaan algoritmik ini bersifat difus dan normalisasi, yakni ia bekerja dengan membuat pengguna menginternalisasi kebiasaan tertentu tanpa sadar bahwa mereka sedang diarahkan. Dalam bahasa Foucault, ini merupakan bentuk "governmentality", yaitu cara kekuasaan bekerja tidak melalui larangan, tetapi melalui pengelolaan kehidupan sehari-hari.

Misalnya, algoritma mendorong pengguna untuk menonton lebih lama, menyukai konten tertentu, atau bahkan mengadopsi gaya hidup dan opini politik tertentu berdasarkan pola konsumsi mereka. Dalam proses ini, subjek

digital dibentuk melalui interpelasi algoritmik — mereka dikonstruksi sebagai "produk" dari data yang mereka hasilkan, bukan sekadar sebagai pengguna bebas.

Konsekuensinya, kekuasaan algoritmik bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang produksi identitas dan pengendalian subjektivitas. Ini menciptakan lanskap kekuasaan baru yang lebih halus namun lebih menyeluruh: sebuah sistem di mana perilaku, pikiran, dan preferensi dapat diprediksi, dibentuk, dan dimonetisasi.

3.3. Produksi Pengetahuan oleh Algoritma

Dalam era digital, algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi informasi, tetapi juga memainkan peran fundamental dalam produksi pengetahuan. Melalui mekanisme seleksi dan pengurutan konten, algoritma secara aktif menciptakan hierarki kebenaran, yaitu sistem nilai yang menentukan informasi mana yang dianggap penting, valid, dan layak diketahui oleh publik. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault mengenai "rezim kebenaran" (regime of truth), yakni struktur kekuasaan yang menentukan batas antara pengetahuan yang diakui dan yang disisihkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma bekerja secara kuat tetapi tidak kasat mata dalam memformulasikan lanskap epistemologis masyarakat digital. Alih-alih menyajikan keragaman perspektif atau kompleksitas informasi, algoritma cenderung mengedepankan konten yang mendapatkan tingkat keterlibatan tinggi (misalnya klik, suka, komentar). Konten-konten ini sering kali bersifat populis, emosional, atau kontroversial, yang secara statistik lebih menarik, tetapi tidak selalu representatif atau berkualitas secara substansial. Dalam konteks ini, algoritma bertindak sebagai editor tak terlihat, yang menentukan narasi dominan dan membungkam suara-suara yang berbeda.

Sebagai contoh, dalam platform berita digital seperti Google News, Feedly, atau aplikasi berbasis algoritma lainnya, artikel yang mendapatkan eksposur paling besar bukanlah yang paling akurat atau seimbang, melainkan yang paling banyak di-klik. Akibatnya, logika popularitas menggantikan logika verifikasi, dan pengetahuan dikomodifikasi menjadi sekadar produk konsumsi yang harus "menjual". Ini menciptakan kondisi di mana truthfulness (kebenaran) dikalahkan oleh virality (ketersiaran) (Rampai, n.d.).

Dampaknya, masyarakat digital tidak lagi mengakses informasi secara netral atau objektif, melainkan melalui kurasi algoritmik yang sarat bias struktural. Bias ini tidak bersifat ideologis secara eksplisit, tetapi bersumber dari parameter teknis yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan dan durasi waktu pengguna di platform. Dalam proses ini, informasi yang menantang narasi dominan, atau berasal dari kelompok marjinal, sering kali mengalami pengaburan visibilitas (visibility suppression).

Lebih jauh, algoritma juga memperkuat pengetahuan hegemonik, yaitu narasi dari kelompok yang sudah memiliki posisi dominan dalam struktur sosial. Konten dari sumber yang dianggap kredibel oleh sistem (sering kali karena popularitas historis, otoritas institusional, atau jaringan distribusi besar) diberi peringkat lebih tinggi, sementara sumber-sumber alternatif atau lokal mengalami kesulitan untuk mencapai audiens luas. Ini memperlihatkan bahwa produksi pengetahuan digital tidak lepas dari relasi kuasa — justru sangat dipengaruhi olehnya.

Dalam konteks ini, algoritma berfungsi bukan hanya sebagai filter teknis, tetapi sebagai aktor epistemologis yang menentukan apa yang diketahui dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ia menyusun semacam arsitektur kebenaran digital, di mana batas antara fakta dan opini menjadi kabur, dan akses terhadap informasi bergantung pada parameter performatif, bukan normatif. Dengan demikian, kita tidak hanya menghadapi era overload informasi, tetapi juga era algorithmic truth-making, dimana algoritma berperan sebagai arsitek realitas pengetahuan..

3.4. Analisis Kritis: Perspektif Foucault

Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang hanya dimiliki atau dijalankan oleh lembaga-lembaga formal seperti negara, melainkan sebagai sesuatu yang tersebar, produktif, dan mengalir melalui jaringan sosial. Kekuasaan bukan hanya represif, tetapi juga produktif—ia membentuk subjektivitas, perilaku, dan cara berpikir. Dalam konteks ini, algoritma digital dapat dilihat sebagai alat baru produksi kekuasaan, bukan hanya sebagai teknologi netral yang mengatur distribusi konten.

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait secara inheren; pengetahuan adalah bentuk kekuasaan, dan kekuasaan beroperasi melalui produksi dan pengaturan pengetahuan. Dalam masyarakat digital, algoritma berfungsi sebagai agen epistemologis yang menentukan apa yang layak diketahui, bagaimana informasi

disusun, dan siapa yang memiliki akses terhadap narasi dominan. Dengan kata lain, algoritma mengatur hubungan kita terhadap realitas, dan dengan itu, mengatur bentuk-bentuk kekuasaan yang bekerja di dalamnya.

Berbeda dengan kekuasaan tradisional yang bersifat hierarkis dan terlihat—misalnya dalam bentuk sensor negara atau kontrol editorial media massa—kekuasaan algoritmik bersifat tersembunyi dan bekerja melalui mekanisme otomatisasi data. Algoritma tidak melarang, tetapi mengarahkan; tidak memaksa secara langsung, tetapi menciptakan lingkungan pilihan yang terbatas secara sistemik. Ini adalah bentuk kekuasaan difus, yang membuat subjek merasa bebas padahal pilihan mereka telah dikondisikan secara tidak sadar oleh sistem.

Dalam proses ini, algoritma menjadi alat dari apa yang oleh Foucault disebut sebagai "mekanisme pendisiplinan", yaitu proses internalisasi norma dan perilaku tertentu tanpa paksaan eksplisit. Misalnya, pengguna media sosial menyesuaikan cara berbagi, menyukai, atau mencari informasi berdasarkan apa yang mereka ketahui akan "disukai" algoritma, baik untuk mendapatkan perhatian, visibilitas, atau validasi sosial. Pola ini menunjukkan bagaimana subjektivitas digital dibentuk oleh insentif algoritmik, bukan oleh pilihan bebas sepenuhnya.

Lebih jauh, kekuasaan algoritmik ini juga menunjukkan transformasi dalam struktur kontrol sosial: jika kekuasaan pada masa lalu dijalankan oleh institusi yang terlihat seperti sekolah, rumah sakit, atau penjara (seperti yang dibahas Foucault dalam *Discipline and Punish*), kini kekuasaan itu dijalankan oleh entitas teknologis dan korporasi global melalui infrastruktur digital yang menyelubungi kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat algoritmik, tidak ada penjaga yang jelas, namun individu terus diawasi, dinilai, dan dibentuk melalui *datafied subjectivity* — yakni identitas yang dibangun dari data-data perilaku.

Dengan demikian, teori kekuasaan Foucault sangat relevan dalam membaca realitas digital masa kini. Ia memungkinkan kita untuk memahami bahwa algoritma tidak netral atau hanya bersifat teknis, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang mengatur hidup sosial, membentuk narasi dominan, dan menciptakan tatanan epistemologis baru. Kekuasaan algoritmik adalah bentuk biopolitik digital, di mana hidup manusia dipetakan, diprediksi, dan dikendalikan melalui angka dan perhitungan sistematis.

3.5. Pembahasan dan interpretasi

Dalam konteks digital saat ini, kekuasaan algoritmik bukan hanya sebuah alat teknis yang mengelola distribusi informasi, tetapi juga memainkan peran sebagai agen yang membentuk realitas sosial, perilaku, dan pemahaman kita tentang dunia. Fenomena polarisasi informasi yang semakin tajam, yang diperburuk dengan adanya ruang gema digital dan filter bubble, menunjukkan bagaimana algoritma membentuk pandangan dunia yang terkurasi sempit dan memperkuat keyakinan yang sudah ada (Schwab, 2019). Algoritma beroperasi tidak hanya sebagai selektor konten yang bersifat personalisasi, tetapi juga menciptakan dan mengonsolidasikan narasi dominan yang sering kali mengabaikan perspektif alternatif. Dalam hal ini, konsep digital echo chambers yang dikembangkan oleh Foucault, terkait dengan panoptikon, memperlihatkan bahwa meskipun pengguna merasa bebas untuk memilih informasi, mereka sebenarnya terjebak dalam pola konsumsi informasi yang sudah diarahkan oleh sistem algoritmik (Bagus, 2025).

Pola pengawasan yang tersembunyi ini menciptakan bentuk kekuasaan yang lebih halus namun lebih efektif daripada kontrol tradisional yang bersifat represif. Panoptikon digital, dimana algoritma bertindak sebagai pengamat senyap yang tidak terlihat tetapi terus memantau aktivitas pengguna, menggambarkan bagaimana kekuasaan algoritmik tidak bekerja dengan cara memaksa atau melarang, tetapi dengan cara mengarahkan pilihan-pilihan individu melalui prediksi dan personalisasi (Nonet & Selznick, 2019). Dalam hal ini, algoritma bertindak sebagai mekanisme pendisiplinan, membentuk perilaku dan preferensi pengguna tanpa mereka sadari, mirip dengan konsep *governmentality* yang diperkenalkan Foucault, di mana kekuasaan beroperasi melalui pengelolaan kehidupan sehari-hari tanpa paksaan eksplisit (Sahdan, 2020).

Lebih jauh, algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyaring dan mengorganisir informasi, tetapi juga sebagai pencipta kebenaran digital yang mendefinisikan apa yang dianggap sah dan valid dalam ruang publik. Melalui mekanisme seleksi yang didorong oleh keterlibatan dan popularitas, algoritma mengedepankan konten yang sensasional atau emosional, mengorbankan kualitas informasi demi keterlibatan yang lebih besar (Judijanto et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bagaimana pengetahuan dalam dunia digital tidak lagi dipilih berdasarkan verifikasi atau kebenaran, melainkan berdasarkan apa yang lebih banyak memperoleh perhatian publik, menciptakan kondisi di mana *truthfulness* (kebenaran) sering kali kalah dengan *virality* (ketersiaran). Dengan demikian, algoritma berperan aktif dalam membentuk struktur pengetahuan digital yang sarat dengan bias teknis dan ideologis, menghapus ruang untuk diskursus yang lebih beragam dan kompleks (Zamroni, 2017).

Dalam perspektif biopolitik Foucault, kekuasaan algoritmik juga beroperasi sebagai cara baru untuk memetakan, memprediksi, dan mengendalikan kehidupan manusia melalui data. Data yang dikumpulkan oleh algoritma membentuk identitas digital pengguna, mempengaruhi preferensi mereka, dan mengarahkan perilaku mereka tanpa mereka sadari. Hal ini menciptakan *datafied subjectivity*, yaitu identitas yang dibentuk berdasarkan data yang dihasilkan oleh individu, yang pada gilirannya mengarah pada sebuah struktur kekuasaan yang lebih terselubung namun sangat efektif dalam mengatur kehidupan sosial. Algoritma bukan hanya bekerja di belakang layar untuk mengontrol apa yang kita lihat, tetapi juga membentuk apa yang kita ketahui dan bagaimana kita memandang dunia, menjadikan kekuasaan algoritmik sebagai bentuk biopolitik digital yang mengatur kehidupan manusia melalui angka dan perhitungan sistematis (Alif, n.d.).

Dengan demikian, kekuasaan algoritmik bukan hanya tentang mengawasi atau mengontrol perilaku individu dalam dunia digital, tetapi juga tentang membentuk realitas sosial dan pengetahuan melalui teknologi yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan dan keuntungan ekonomi. Algoritma berfungsi sebagai agen epistemologis yang menentukan apa yang sah, apa yang benar, dan siapa yang memiliki akses terhadap narasi dominan, menciptakan struktur kekuasaan baru dalam masyarakat digital yang semakin terkomodifikasi dan terfragmentasi (Prasetyono & Pandor, 2024).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma media memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan dan memperkuat polarisasi informasi di masyarakat digital. Melalui mekanisme seleksi dan rekomendasi konten yang dikendalikan oleh algoritma, platform digital tidak hanya menyediakan informasi yang relevan dan disesuaikan dengan preferensi pengguna, tetapi juga secara tidak langsung membatasi paparan terhadap perspektif yang lebih beragam. Proses ini menciptakan fenomena ruang gema digital (*digital echo chambers*), di mana pengguna cenderung terus-menerus terpapar pada pandangan dan informasi yang memperkuat keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Di sisi lain, fenomena gelembung filter (*filter bubbles*), yang merupakan hasil dari algoritma yang menyaring konten berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna, mengisolasi individu dari wacana yang lebih luas dan lebih seimbang. Fenomena ini berperan penting dalam memperkuat bias konfirmasi (*confirmation bias*), yang mendorong individu untuk lebih memilih dan mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, sementara informasi yang bertentangan atau alternatif semakin terpinggirkan. Melalui perspektif teori kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault, algoritma dapat dipahami sebagai instrumen kekuasaan modern yang secara efektif membentuk "rezim kebenaran" baru dalam masyarakat digital. Foucault menggambarkan bagaimana kekuasaan bukan hanya bekerja melalui mekanisme yang tampak seperti hukum atau kekerasan fisik, tetapi juga melalui produksi dan pengelolaan pengetahuan. Dalam konteks ini, algoritma tidak hanya mengatur arus informasi yang diterima oleh pengguna, tetapi juga menciptakan hierarki pengetahuan yang menentukan apa yang dianggap relevan, benar, atau layak diterima dalam ruang publik digital. Algoritma dengan cara ini berperan sebagai agen pembentuk kebenaran—mengatur apa yang akan diketahui oleh masyarakat dan apa yang akan dikesampingkan. Kekuasaan algoritmik ini bersifat tidak terlihat, tersembunyi di balik layar teknologi, namun sangat berpengaruh. Dampaknya, ia mengubah dinamika hubungan manusia dengan pengetahuan serta pola interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan ruang yang lebih sempit bagi pluralitas ide dan narasi. Dalam dunia digital yang semakin terhubung, algoritma tidak hanya mengatur akses informasi tetapi juga membentuk cara kita memahami realitas sosial dan politik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa algoritma media bukan sekadar teknologi netral yang bertugas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, melainkan sebuah alat kekuasaan yang secara sistematis mengontrol distribusi informasi dan produksi pengetahuan. Algoritma memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya. Dalam hal ini, keberadaan algoritma sebagai pengatur utama aliran informasi menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap keberagaman informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Jika dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, algoritma berisiko memperburuk polarisasi dan memperkecil ruang untuk diskusi kritis yang konstruktif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat terhadap algoritma yang digunakan oleh platform digital untuk mengurangi dampak negatif polarisasi informasi. Salah satu saran utama dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan kebijakan yang mendukung transparansi algoritma dan memberikan pengguna kontrol lebih besar terhadap konten yang mereka terima. Pengaturan ini juga dapat mencakup upaya untuk memastikan keberagaman informasi, dengan mendorong platform untuk menampilkan berbagai sudut pandang yang seimbang, daripada hanya yang paling populer atau sensasional. Lebih lanjut, pendidikan literasi digital yang lebih baik juga diperlukan untuk membantu pengguna memahami bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana mereka dapat mengelola paparan terhadap informasi yang lebih beragam. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai kekuasaan algoritmik dan dampaknya dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana algoritma membentuk narasi dominan dan memperkuat struktur sosial yang sudah ada akan sangat bermanfaat

bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi. Kajian lebih lanjut juga dapat menggali hubungan antara kekuasaan algoritmik dan ketidaksetaraan sosial, serta bagaimana algoritma dapat memperburuk kesenjangan informasi yang ada, memperdalam fragmentasi sosial, atau bahkan memperburuk polarisasi politik. Di samping itu, penting juga untuk melihat bagaimana algoritma berinteraksi dengan faktor-faktor lain, seperti kebijakan ekonomi platform dan dinamika kekuasaan politik, dalam membentuk pengalaman digital pengguna. Dengan demikian, analisis kritis yang lebih luas tentang algoritma dapat memberikan wawasan penting dalam merancang masa depan digital yang lebih inklusif, adil, dan transparan.

Referensi

- Aksenta, A., Irmawati, I., Ridwan, A., Hayati, N., Sepriano, S., Herlinah, H., Silalah, A. T., Pipin, S. J., Abdurrohm, I., & Boari, Y. (2023). *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alif, A. (n.d.). *Penjara Virtual Bernama Media Sosial*. Guepedia.
- Andzani, D. (2023). Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(11), 1964–1976.
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial public opinion of political polarization on social media. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 20(2), 111.
- Ardhana, V. Y. P., Sari, M. N., Kumoro, D. T., Hidayati, L., Prasetyo, Y. P. W., Liantoni, F., Mulyodiputro, M. D., Haryadi, D., & Setiawan, D. (2025). *Strategi dan Teknologi Media Sosial*. Mega Press Nusantara.
- Arjuna, B., Mulyadi, B. S., Asardan, M. H., Adristina, N., Sekarwangi, N., Ardana, R. A. Z., Hanafi, R., & Khaerani, S. (2024). Pengaruh Algoritma Rekomendasi terhadap Personalisasi Konten Digital di TikTok pada Mahasiswa Sistem Informasi UNNES. *Jurnal Potensial*, 3(1), 117–127.
- Bagus, J. M. (2025). *Dari Desa Ke Dunia Maya: Evolusi KIM Di Tengah Transformasi Digital*. Goresan Pena.
- Dani, A. (2021). *Efek Ruang Gema (Echo Chambers) Terhadap Preferensi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Sumatera Barat*. Universitas Andalas.
- Foucault, M. (1972). Interview-Questions on Geography. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*.
- Foucault, M. (1991). The Foucault effect: studies in governmentality. *Harvester Wheatsheaf*.
- Gordon, C., & Foucault, M. (1980). *selected interviews and other writings 1972– 1977*. New York: Pantheon Books.
- Judijanto, L., Setiawan, Z., Wiliyanti, V., Gunawan, P. W., Suryawan, I. G. T., Mardiana, S., Ridwan, A., Kusumastuti, S. Y., Putra, B. P. P., & Joni, I. D. M. A. B. (2024). *Literasi Digital di Era Society 5.0: Panduan Cerdas Menghadapi Transformasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Khozin, A. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 132–149.
- Levina Yustitiantingtyas, S. H. (2025). BAHASA DAN KEADILAN. *Bahasa Dan Keadilan: Pendekatan Linguistik Forensik Di Pengadilan*, 122.
- Mikelsten, D. (2019). *Otomasi dan Teknologi Berkembang* (Vol. 3). Cambridge Stanford Books.
- Mudjiyanto, B., & Dunan, A. (2020). Literasi Media di Era Post Truth. *PROMEDIA (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 6(2).
- Nasution, M. D. (2024). *Perkembangan Teknologi Dan Transformasi Digital Dalam Dunia Pendidikan*. umsu press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Prasetyono, E., & Pandor, P. (2024). Manusia Dalam Logika Politik di Era Media Digital. *Studia Philosophica et Theologica*, 24(2), 116–134.
- Rampai, B. (n.d.). *di MEDIA BARU*.
- Ross Arguedas, A., Robertson, C., Fletcher, R., & Nielsen, R. (2022). *Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: A literature review*.
- Rouvroy, A., Berns, T., & Carey-Libbrecht, L. (2013). Algorithmic governmentality and prospects of emancipation. *Réseaux*, 177(1), 163–196.
- Sahdan, G. (2020). Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 41–57.
- Schwab, K. (2019). *Revolusi industri keempat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sheridan, A. (1977). *Discipline and punish*. Pantheon New York.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.
- Wulandari, S. R. (2021). *Kuasa Algoritma dan Resiliensi Khalayak Pengguna Media Sosial= Algorithm's Power and The Resilience of Social Media Users*. Universitas Hasanuddin.
- Zamroni, M. (2017). *Media sosial dan realitas gaya hidup masyarakat postmodern*.
- Zuboff, S. (2023). The age of surveillance capitalism. In *Social theory re-wired* (pp. 203–213). Routledge.